

**REPRESENTASI AKTOR SOSIAL
DALAM WACANA DIGITALISASI PENDIDIKAN:
ANALISIS WACANA KRITIS MODEL THEO VAN LEEUWEN
TERHADAP PEMBERITAAN PELUNCURAN TRANSFORMASI
PEMBELAJARAN OLEH PRESIDEN**

Badruzia Hanafiah¹, Agus Hamdani², Ujang Andi Mulyadi³

^{1,2,3} Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut

Email: badruziahanafian@gmail.com¹ gushamdan96@gmail.com²
andimulyadi666@gmail.com³

ABSTRAK

Digitalisasi pendidikan menjadi salah satu agenda penting dalam transformasi sistem pendidikan di Indonesia. Namun, dalam perspektif analisis wacana kritis, kebijakan digitalisasi pendidikan tidak hanya merepresentasikan perubahan teknologis dalam proses pembelajaran, tetapi juga merupakan konstruksi wacana yang memuat relasi kekuasaan dan kepentingan ideologis tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi aktor sosial dalam pemberitaan mengenai peluncuran program digitalisasi pembelajaran oleh Presiden Prabowo Subianto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode Analisis Wacana Kritis (AWK) model Theo van Leeuwen yang berfokus pada strategi eksklusi dan inklusi dalam representasi aktor sosial. Data penelitian berupa teks berita dari Kompas.id edisi 17 November 2025 berjudul “*Luncurkan Digitalisasi Pembelajaran, Presiden Dorong Percepatan Transformasi Pendidikan.*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa teks berita cenderung menampilkan dominasi representasi aktor negara, khususnya Presiden dan Menteri, melalui strategi nominasi dan individualisasi yang menempatkan mereka sebagai penggerak utama transformasi pendidikan. Sebaliknya, aktor pendidikan seperti guru dan murid lebih sering direpresentasikan sebagai kelompok kolektif melalui strategi pasivasi dan asimilasi, sehingga peran dan agensi mereka dalam proses pendidikan menjadi kurang terlihat. Selain itu, penggunaan angka dan statistik dalam teks berfungsi sebagai strategi legitimasi kebijakan yang menonjolkan capaian kuantitatif program digitalisasi pendidikan. Temuan ini menunjukkan bahwa wacana digitalisasi pendidikan dalam media tidak hanya menyampaikan informasi kebijakan, tetapi juga membangun konstruksi ideologis mengenai peran negara dan teknologi dalam sistem pendidikan.

Kata kunci: analisis wacana kritis, digitalisasi pendidikan, representasi aktor sosial, media, Theo van Leeuwen.

ABSTRACT

The digitalization of education is a key agenda in the transformation of the education system in Indonesia. However, from a critical discourse analysis perspective, the digitalization policy not only represents technological change in the learning process but also constitutes a discourse construction that contains power relations and certain ideological interests. This study aims to analyze the representation of social actors in

news reports regarding the launch of the digitalization program for learning by President Prabowo Subianto. This study uses a descriptive qualitative approach with the Critical Discourse Analysis (AWK) method modeled by Theo van Leeuwen, which focuses on strategies of exclusion and inclusion in the representation of social actors. The research data consists of a news text from Kompas.id, November 17, 2025, edition entitled "Launching Digitalization of Learning, President Pushes for Accelerated Transformation of Education." The results show that the news text tends to display the dominant representation of state actors, particularly the President and Ministers, through strategies of nomination and individualization that position them as the main drivers of educational transformation. In contrast, educational actors such as teachers and students are more often represented as collective groups through strategies of passivation and assimilation, thus making their role and agency in the educational process less visible. Furthermore, the use of numbers and statistics in the text serves as a policy legitimization strategy that emphasizes the quantitative achievements of the education digitalization program. These findings indicate that the discourse on education digitalization in the media not only conveys policy information but also constructs ideological constructs regarding the role of the state and technology in the education system.

Keywords: *critical discourse analysis, education digitalization, representation of social actors, media, Theo van Leeuwen.*

PENDAHULUAN

Digitalisasi pendidikan dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu agenda strategis dalam reformasi sistem pendidikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Integrasi teknologi digital dalam pembelajaran diyakini mampu meningkatkan akses pendidikan, memperluas sumber belajar, serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui pemanfaatan media interaktif dan platform digital. Dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, transformasi digital dipandang sebagai langkah penting untuk menjawab tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, serta tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperluas akses pendidikan, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan

infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital guru, serta ketimpangan akses antarwilayah (Muhammadiah et al., 2023; Oktarin, 2024; Sari, 2025). Dalam konteks Indonesia, agenda digitalisasi pendidikan semakin menguat melalui berbagai kebijakan pemerintah yang menekankan percepatan transformasi pendidikan berbasis teknologi. Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional yang menempatkan teknologi sebagai instrumen utama modernisasi sistem pendidikan. Namun demikian, dalam perspektif analisis wacana kritis, kebijakan pendidikan tidak hanya dipahami sebagai kebijakan teknis yang bersifat administratif, melainkan juga sebagai praktik diskursif yang memuat relasi kekuasaan, ideologi, serta kepentingan politik tertentu (Fairclough, 2013; Van Dijk, 2015; Wodak & Meyer, 2016). Bahasa yang digunakan dalam narasi kebijakan dan pemberitaan media

REPRESENTASI AKTOR SOSIAL DALAM WACANA DIGITALISASI PENDIDIKAN:
ANALISIS WACANA KRITIS MODEL THEO VAN LEEUWEN TERHADAP
PEMBERITAAN PELUNCURAN TRANSFORMASI PEMBELAJARAN OLEH PRESIDEN
Badruzia Hanafiah, Agus Hamdani, Ujang Andi Mulyadi

memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap suatu kebijakan, karena melalui bahasa tersebut aktor-aktor sosial dapat ditampilkan, disembunyikan, atau diposisikan secara strategis dalam suatu wacana (Eriyanto, 2001; Zulkifli, 2023). Media massa memiliki posisi penting dalam proses konstruksi wacana kebijakan pendidikan. Sebagai institusi yang memproduksi dan menyebarkan informasi kepada publik, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai berita, tetapi juga sebagai agen yang membentuk realitas sosial melalui proses seleksi, penonjolan, dan pengemasan informasi (Machin & Mayr, 2012; Nguyen, 2021). Dalam praktiknya, media dapat menentukan aktor mana yang ditampilkan sebagai pelaku utama dalam suatu kebijakan serta aktor mana yang ditempatkan dalam posisi marginal (Putra, 2021; Yulianto, 2022). Representasi tersebut berpengaruh terhadap cara masyarakat memahami suatu kebijakan (Pendri, 2024; Yu, 2024).

Dalam kajian analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis/CDA), bahasa dipandang sebagai praktik sosial yang tidak pernah bersifat netral. CDA berupaya mengungkap bagaimana bahasa digunakan untuk membangun dan mempertahankan relasi kekuasaan dalam masyarakat (Fairclough, 2013; Van Dijk, 2015). Pendekatan ini banyak digunakan untuk menganalisis teks institusional (Jenks, 2020; Wodak & Meyer, 2016).

Salah satu pendekatan penting dalam CDA adalah model representasi aktor sosial oleh van Leeuwen (2000, 2008). Model ini menekankan strategi eksklusif dan inklusif dalam representasi aktor sosial. Pendekatan ini telah banyak digunakan dalam penelitian wacana

media (Hartanto, 2020; Suharni, 2022; Wulandari et al., 2023).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan berkaitan dengan dinamika sosial-politik (Lee, 2020; Prasetyo, 2023). Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek implementatif (Muhammadiyah et al., 2023; Oktarin, 2024). Selain itu, kajian CDA lebih banyak menyoroti isu umum dan belum spesifik pada representasi aktor dalam kebijakan digitalisasi pendidikan (Fauzi & Mashuri, 2022; Majid, 2023; Rahmawati, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif yang bertujuan untuk memahami makna, ideologi, serta relasi kekuasaan yang terkandung dalam teks media. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak berorientasi pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada penafsiran makna dalam konteks sosial. Dalam kerangka analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis/CDA), bahasa dipahami sebagai praktik sosial yang merepresentasikan kepentingan dan kekuasaan tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana aktor sosial direpresentasikan dalam teks berita tanpa melakukan manipulasi terhadap data.

Sumber data penelitian ini adalah teks berita dari portal Kompas.id berjudul "*Luncurkan Digitalisasi Pembelajaran, Presiden Dorong Percepatan Transformasi Pendidikan*" yang dipublikasikan pada 17 November 2025. Data penelitian berupa satuan lingual, seperti kata, frasa, klausa, dan kalimat yang mengandung representasi aktor sosial dalam wacana digitalisasi

REPRESENTASI AKTOR SOSIAL DALAM WACANA DIGITALISASI PENDIDIKAN:
ANALISIS WACANA KRITIS MODEL THEO VAN LEEUWEN TERHADAP
PEMBERITAAN PELUNCURAN TRANSFORMASI PEMBELAJARAN OLEH PRESIDEN
Badruzia Hanafiah, Agus Hamdani, Ujang Andi Mulyadi

pendidikan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik simak dan catat, yaitu dengan membaca teks secara menyeluruh untuk memahami konteks wacana, kemudian mencatat bagian-bagian yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model representasi aktor sosial dari Theo van Leeuwen yang mencakup dua strategi utama, yaitu eksklusif dan inklusif. Analisis eksklusif difokuskan pada identifikasi bentuk penghilangan atau penyamaran aktor dalam teks, seperti penggunaan pasivasi, nominalisasi, dan pengaburan melalui struktur klausa. Sementara itu, analisis inklusif diarahkan pada cara aktor dihadirkan dan diposisikan dalam teks, meliputi strategi nominasi, kategorisasi, diferensiasi, dan objektivasi. Hasil analisis linguistik kemudian diinterpretasikan secara kritis dengan mengaitkannya pada konteks sosial yang lebih luas untuk mengungkap makna ideologis, relasi kekuasaan, serta bentuk legitimasi kebijakan digitalisasi pendidikan dalam wacana media. Keabsahan data dijaga melalui ketekunan pengamatan dan konsistensi analisis, yaitu dengan membaca data secara berulang serta memastikan kesesuaian temuan dengan kerangka teori yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa representasi aktor sosial dalam wacana digitalisasi pendidikan pada teks berita tidak muncul secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari pilihan linguistik yang secara strategis membangun citra tertentu mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan pendidikan. Dalam kerangka analisis wacana kritis, bahasa dipahami sebagai praktik sosial yang memiliki kemampuan untuk membangun,

mempertahankan, maupun melegitimasi relasi kekuasaan dalam masyarakat (Fairclough, 2013). Oleh karena itu, analisis terhadap strategi representasi aktor sosial dalam teks media menjadi penting untuk mengungkap bagaimana kebijakan pendidikan dikonstruksi dan dipahami oleh publik.

Berdasarkan analisis terhadap teks berita mengenai program digitalisasi pembelajaran, ditemukan bahwa representasi aktor sosial dalam wacana tersebut cenderung menempatkan teknologi sebagai solusi utama dalam transformasi pendidikan, sementara aktor negara diposisikan sebagai penggerak utama perubahan. Sebaliknya, aktor pendidikan seperti guru dan murid direpresentasikan sebagai kelompok yang relatif pasif dan menjadi penerima manfaat kebijakan. Pola representasi ini sejalan dengan konsep representasi aktor sosial yang dikemukakan oleh Theo van Leeuwen (2008). Menurutnya, terdapat dua strategis yang menjadi titik fokus perhatian, yaitu proses pengeluaran tokoh (eksklusif) dan proses pemasukan tokoh (inklusif).

a. Analisis Strategi Eksklusif

Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi eksklusif digunakan secara signifikan dalam teks berita untuk menghilangkan atau menyamaran aktor tertentu yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan digitalisasi pendidikan. Dalam model Van Leeuwen, strategi eksklusif merujuk pada cara aktor sosial dihilangkan dari teks melalui struktur bahasa tertentu sehingga tanggung jawab tindakan tidak terlihat secara eksplisit.

1) Pasivasi (Passivization):

Penggunaan kalimat pasif dalam teks berita, seperti pada kalimat “*Digitalisasi pembelajaran mulai digagas pada Mei 2025*” dan “*173.000 panel terpasang di 173.000 sekolah*”, menunjukkan strategi

REPRESENTASI AKTOR SOSIAL DALAM WACANA DIGITALISASI PENDIDIKAN:
ANALISIS WACANA KRITIS MODEL THEO VAN LEEUWEN TERHADAP
PEMBERITAAN PELUNCURAN TRANSFORMASI PEMBELAJARAN OLEH PRESIDEN
Badruzia Hanafiah, Agus Hamdani, Ujang Andi Mulyadi

pasivasi yang menghilangkan aktor pelaku dari peristiwa tersebut. Struktur kalimat pasif menyebabkan tindakan terlihat sebagai proses yang terjadi secara alami tanpa menunjukkan siapa yang bertanggung jawab terhadap tindakan tersebut.

Dalam perspektif analisis wacana kritis, pasivasi sering digunakan dalam teks media untuk mengaburkan aktor yang memiliki tanggung jawab terhadap suatu tindakan atau kebijakan (Machin & Mayr, 2012). Dengan menghilangkan pelaku tindakan, perhatian pembaca diarahkan pada hasil kebijakan yang terlihat berhasil, sementara proses implementasi yang melibatkan berbagai aktor birokratis menjadi tidak terlihat. Penelitian terbaru mengenai representasi aktor sosial dalam media juga menunjukkan bahwa strategi pasivasi sering digunakan dalam pemberitaan kebijakan publik untuk mengurangi potensi kritik terhadap aktor yang memiliki kekuasaan (Nguyen, 2021; Rahmawati, 2024).

2) Nominalisasi (Nominalization): Selain pasivasi, strategi eksklusi juga muncul melalui penggunaan nominalisasi, yaitu pengubahan verba tindakan menjadi kata benda peristiwa. Diksi seperti "*pemasangan panel*" atau "*peluncuran program*" menjadikan tindakan manusia tampak sebagai peristiwa administratif yang bersifat netral. Nominalisasi dalam teks kebijakan sering berfungsi untuk menaturalisasi tindakan politik sehingga terlihat sebagai proses yang tidak memiliki aktor tertentu.

Fairclough (2013) menjelaskan bahwa nominalisasi merupakan strategi linguistik yang dapat mengaburkan hubungan antara tindakan dan pelakunya. Dalam konteks kebijakan publik, strategi ini sering digunakan untuk mengurangi dimensi politis dari

suatu kebijakan sehingga kebijakan tersebut tampak sebagai proses teknis yang netral. Penelitian mengenai wacana kebijakan pendidikan digital juga menunjukkan bahwa nominalisasi sering digunakan dalam narasi pemerintah untuk menggambarkan reformasi pendidikan sebagai proses administratif yang rasional dan tidak kontroversial (Lee, 2020; Prasetyo, 2023).

3) Penggantian Anak Kalimat
(Substitution of Clauses):

Strategi eksklusi juga ditemukan melalui penggunaan klausa tujuan atau sebab-akibat yang menyembunyikan aktor dalam struktur kalimat. Contohnya dapat dilihat pada kalimat "*Untuk mengajarnya, akselerasi pendidikan tidak bisa dilakukan sebagai langkah tunggal.*" Penggunaan klausa tujuan "*untuk mengajarnya*" menghilangkan aktor yang sebenarnya bertanggung jawab dalam upaya mengejar ketertinggalan tersebut.

Menurut Van Leeuwen (2008), penghilangan aktor melalui struktur klausa merupakan salah satu strategi eksklusi yang memungkinkan teks menyembunyikan aktor tertentu tanpa menghilangkan informasi mengenai tindakan yang dilakukan. Strategi ini berfungsi untuk membangun kesan bahwa tindakan tersebut merupakan kebutuhan sistemik yang tidak dapat dihindari. Dengan demikian, percepatan digitalisasi pendidikan diposisikan sebagai keharusan struktural yang harus diterima oleh seluruh aktor pendidikan.

b. Analisis Strategi Inklusi

Selain strategi eksklusi, teks berita juga menunjukkan penggunaan strategi inklusi yang menentukan bagaimana aktor sosial dimasukkan dan diposisikan dalam wacana. Strategi inklusi berperan penting dalam membangun citra tertentu mengenai aktor yang dianggap memiliki

REPRESENTASI AKTOR SOSIAL DALAM WACANA DIGITALISASI PENDIDIKAN:
ANALISIS WACANA KRITIS MODEL THEO VAN LEEUWEN TERHADAP
PEMBERITAAN PELUNCURAN TRANSFORMASI PEMBELAJARAN OLEH PRESIDEN
Badruzia Hanafiah, Agus Hamdani, Ujang Andi Mulyadi

peran penting dalam kebijakan pendidikan.

1) Diferensiasi-Indiferensiasi:

Strategi diferensiasi terlihat dalam cara teks membandingkan kondisi pendidikan di daerah tertentu dengan standar negara maju. Penggunaan istilah seperti “*daerah tertinggal*” dan pernyataan mengenai rendahnya kompetensi guru membangun dikotomi antara pusat dan daerah. Dalam wacana tersebut, daerah diposisikan sebagai wilayah yang mengalami kekurangan, sementara negara dipresentasikan sebagai pihak yang memberikan solusi.

Strategi diferensiasi semacam ini sering digunakan dalam wacana pembangunan untuk membangun legitimasi terhadap intervensi pemerintah (Wodak & Meyer, 2016). Penelitian terbaru mengenai wacana kebijakan pendidikan juga menunjukkan bahwa konstruksi ketertinggalan sering digunakan untuk mendukung kebijakan modernisasi berbasis teknologi (Fauzi & Mashuri, 2022; Sari, 2025).

2) Objektivitas-Abstraksi

(Legitimasi Numerik):

Penggunaan angka-angka seperti “*173.000 panel*”, “*1 juta panel*”, dan “*75 persen target*” menunjukkan strategi objektivasi yang berfungsi untuk memberikan kesan objektivitas terhadap kebijakan digitalisasi pendidikan. Dalam wacana kebijakan publik, statistik sering digunakan untuk membangun legitimasi kebijakan karena dianggap sebagai bentuk bukti empiris yang sulit diperdebatkan.

Namun demikian, penggunaan statistik dalam teks media tidak selalu menggambarkan keseluruhan realitas implementasi kebijakan. Angka-angka tersebut dapat berfungsi sebagai alat legitimasi yang mengalihkan perhatian publik dari persoalan kualitas implementasi kebijakan di lapangan. Penelitian mengenai wacana kebijakan

pendidikan digital menunjukkan bahwa legitimasi melalui statistik sering digunakan untuk memperkuat citra keberhasilan program pemerintah (Machin & Mayr, 2012; Zulkifli, 2023).

3) Nominasi-Kategorisasi & Individualisasi-Asimilasi:

Strategi inklusi lainnya terlihat melalui perbedaan cara representasi antara aktor negara dan aktor pendidikan. Presiden dan Menteri Pendidikan disebutkan secara eksplisit melalui penyebutan nama individu, seperti *Presiden Prabowo Subianto* dan *Menteri Abdul Mu'ti*. Strategi ini disebut sebagai individualisasi, yaitu penampilan aktor sebagai individu yang memiliki peran dan agensi yang jelas dalam teks.

Sebaliknya, aktor pendidikan seperti guru dan murid direpresentasikan melalui asimilasi, yaitu penyebutan aktor sebagai kelompok kolektif tanpa identitas individual. Guru tidak disebutkan secara personal, melainkan digambarkan sebagai kelompok yang memiliki kekurangan kompetensi dan memerlukan pelatihan. Perbedaan representasi ini menciptakan hierarki simbolik antara aktor negara dan aktor pendidikan. Menurut Van Leeuwen (2008), individualisasi dan asimilasi merupakan strategi representasi yang dapat digunakan untuk menonjolkan kekuasaan aktor tertentu dalam teks. Aktor yang diindividualisasi cenderung diposisikan sebagai subjek aktif yang memiliki kontrol terhadap tindakan, sedangkan aktor yang diasimilasikan diposisikan sebagai objek kebijakan. Temuan penelitian ini sejalan dengan studi terbaru yang menunjukkan bahwa dalam pemberitaan kebijakan pendidikan, aktor pemerintah sering direpresentasikan sebagai agen perubahan sementara guru diposisikan sebagai penerima kebijakan (Putra, 2021; Rahmawati, 2024).

REPRESENTASI AKTOR SOSIAL DALAM WACANA DIGITALISASI PENDIDIKAN:
ANALISIS WACANA KRITIS MODEL THEO VAN LEEUWEN TERHADAP
PEMBERITAAN PELUNCURAN TRANSFORMASI PEMBELAJARAN OLEH PRESIDEN
Badruzia Hanafiah, Agus Hamdani, Ujang Andi Mulyadi

Berdasarkan keseluruhan temuan analisis, dapat disimpulkan bahwa wacana digitalisasi pendidikan dalam teks berita membangun narasi yang menempatkan teknologi sebagai solusi utama terhadap berbagai persoalan pendidikan. Narasi tersebut mencerminkan apa yang dalam literatur disebut sebagai determinisme teknologi, yaitu keyakinan bahwa teknologi memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara otomatis.

Dalam wacana tersebut, negara diposisikan sebagai aktor utama yang memiliki kemampuan untuk menghadirkan solusi teknologi bagi sistem pendidikan nasional. Sementara itu, aktor pendidikan seperti guru direpresentasikan sebagai kelompok yang membutuhkan intervensi teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pola representasi ini menunjukkan adanya kecenderungan ideologi teknokrasi dalam wacana pendidikan, di mana kebijakan pendidikan dipandang terutama sebagai persoalan teknis yang dapat diselesaikan melalui inovasi teknologi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai wacana digitalisasi pendidikan yang menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan digital sering dipresentasikan sebagai solusi universal terhadap berbagai permasalahan pendidikan, meskipun dalam praktiknya persoalan pendidikan juga berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, dan politik yang lebih kompleks (Lee, 2020; Prasetyo, 2023).

Dengan demikian, analisis representasi aktor sosial dalam teks media tidak hanya mengungkap bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan pendidikan, tetapi juga bagaimana bahasa tersebut berperan dalam membangun legitimasi terhadap

kebijakan serta membentuk persepsi publik mengenai peran negara, teknologi, dan aktor pendidikan dalam proses transformasi Pendidikan

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa representasi aktor sosial dalam wacana digitalisasi pendidikan pada teks berita tidak bersifat netral, melainkan dibentuk melalui strategi linguistik yang mencerminkan relasi kekuasaan dan kepentingan ideologis tertentu. Melalui pendekatan analisis wacana kritis model Theo van Leeuwen, ditemukan bahwa strategi eksklusi dan inklusi digunakan secara sistematis untuk membangun citra aktor dalam kebijakan digitalisasi pendidikan.

Strategi eksklusi, seperti pasivasi, nominalisasi, dan pengaburan melalui struktur klausa, cenderung menghilangkan atau menyamarkan aktor pelaksana kebijakan, sehingga tanggung jawab tindakan tidak terlihat secara eksplisit. Sebaliknya, strategi inklusi menunjukkan adanya dominasi representasi aktor negara, khususnya Presiden dan Menteri, yang dihadirkan melalui strategi nominasi dan individualisasi sebagai penggerak utama transformasi pendidikan. Sementara itu, aktor pendidikan seperti guru dan siswa lebih sering direpresentasikan secara kolektif melalui strategi asimilasi dan pasivasi, yang menempatkan mereka sebagai pihak yang relatif pasif dan sekadar penerima kebijakan.

Selain itu, penggunaan angka dan statistik dalam teks berfungsi sebagai strategi legitimasi yang memperkuat citra keberhasilan program digitalisasi pendidikan secara kuantitatif, meskipun tidak selalu merepresentasikan kompleksitas realitas di lapangan. Secara keseluruhan, wacana digitalisasi pendidikan dalam media cenderung

REPRESENTASI AKTOR SOSIAL DALAM WACANA DIGITALISASI PENDIDIKAN:
ANALISIS WACANA KRITIS MODEL THEO VAN LEEUWEN TERHADAP
PEMBERITAAN PELUNCURAN TRANSFORMASI PEMBELAJARAN OLEH PRESIDEN
Badruzia Hanafiah, Agus Hamdani, Ujang Andi Mulyadi

membangun narasi determinisme teknologi dan ideologi teknokrasi, di mana teknologi diposisikan sebagai solusi utama, sementara negara sebagai aktor dominan dalam proses transformasi pendidikan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi kebijakan, tetapi juga sebagai agen yang membentuk konstruksi sosial dan ideologis mengenai pendidikan. Temuan ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian analisis wacana kritis di bidang pendidikan, khususnya dalam memahami bagaimana kebijakan digitalisasi dikonstruksi, direpresentasikan, dan dilegitimasi dalam ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Eriyanto. (2001). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fairclough, N. (2013). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (2nd ed.). London: Routledge.
- Fauzi, A., & Mashuri, M. (2022). Konstruksi identitas aktor dalam kebijakan pendidikan: Studi analisis wacana kritis. *Jurnal Linguistik Terapan*, 12(2), 45–58.
- Hartanto, B. H. (2020). Critical discourse analysis of online news using Theo van Leeuwen's inclusion strategy. *Aksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 4(1), 1–12.
- Jenks, C. J. (2020). Applying critical discourse analysis to classrooms: Sociopolitical perspectives of classroom discourse. *Classroom Discourse*, 11(2), 123–138. <https://doi.org/10.1080/19463014.2020.1761847>
- Lee, J. S. (2020). The digital promise: A critical discourse analysis of educational technology policies. *Journal of Education Policy*, 35(4), 512–530. <https://doi.org/10.1080/02680939.2019.1656775>
- Machin, D., & Mayr, A. (2012). *How to do critical discourse analysis: A multimodal introduction*. London: SAGE Publications.
- Majid, M. N. (2023). Critical discourse analysis of campus news text using Theo van Leeuwen model. *Jurnal Kajian Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 6(2), 102–118.
- Muhammadiyah, M., Tannuary, A., Romadhianti, R., Fatmawati, E., & Herman, H. (2023). Critical discourse analysis in the education community to respond to hoaxes based on technology and information. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 15(2), 1340–1350.
- Nguyen, H. (2021). Media discourse and social actor representation in political communication. *Journal of Language and Politics*, 20(3), 421–439. <https://doi.org/10.1075/jlp.20045.ngu>
- Oktarin, I. B. (2024). Utilizing critical discourse analysis to enhance digital literacy in higher education. *Journal of Media Literacy Education*, 13(3), 75–85. <https://doi.org/10.23860/JMLE-2021-13-3-6>
- Pendri, A. (2024). A critical discourse analysis of online media discourse on education policy. *International Journal of Society, Culture and Language*, 12(2), 115–129.

REPRESENTASI AKTOR SOSIAL DALAM WACANA DIGITALISASI PENDIDIKAN:
ANALISIS WACANA KRITIS MODEL THEO VAN LEEUWEN TERHADAP
PEMBERITAAN PELUNCURAN TRANSFORMASI PEMBELAJARAN OLEH PRESIDEN
Badruzia Hanafiah, Agus Hamdani, Ujang Andi Mulyadi

- Prasetyo, H. (2023). Teknokratisme dalam wacana pendidikan Indonesia pascapandemi. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Indonesia*, 9(1), 12–29.
- Putra, R. S. (2021). Representasi guru dalam media digital: Analisis sosiolinguistik. *Lingua Aktua*, 15(3), 88–102.
- Rahmawati, D. (2024). Analisis wacana kritis model Theo van Leeuwen pada pemberitaan kebijakan publik di media online. *Jurnal Komunikasi Massa*, 7(1), 23–37.
- Rahimi, A. W. (2025). Critical analysis of media discourse and the politics of self-censorship. *Discourse & Communication*. <https://doi.org/10.1177/17504813241307880>
- Sari, K. (2025). Digitalisasi dan hegemoni: Membedah narasi transformasi pendidikan di Indonesia. *Paradigma Linguistik*, 4(2), 101–115.
- Suharni, S. (2022). Analisis wacana kritis terhadap teks berita menggunakan perspektif Theo van Leeuwen. *Jurnal Pendidikan dan Bahasa*, 5(2), 134–146.
- Van Dijk, T. A. (2015). *Critical discourse analysis*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Van Leeuwen, T. (2000). The representation of social actors. In C. R. Caldas-Coulthard & M. Coulthard (Eds.), *Texts and practices: Readings in critical discourse analysis* (pp. 32–70). London: Routledge.
- Van Leeuwen, T. (2008). *Discourse and practice: New tools for critical discourse analysis*. Oxford: Oxford University Press.
- Wodak, R., & Meyer, M. (2016). *Methods of critical discourse studies* (3rd ed.). London: SAGE Publications.
- Wulandari, P. A., Zamzani, Z., & Liliani, E. (2023). Critical discourse analysis of Theo van Leeuwen inclusion strategies in media discourse. *International Journal of Education and Teaching Zone*, 2(2), 341–348. <https://doi.org/10.57092/ijetz.v2i2.130>
- Yu, Y. (2024). Media representations of inclusive education: A corpus-assisted critical discourse analysis. *PLOS ONE*, 19(3), e0300123. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0300123>
- Yulianto, A. (2022). Marginalisasi aktor sosial dalam pemberitaan media: Perspektif Theo van Leeuwen. *Jurnal Analisis Sosial*, 18(4), 205–220.
- Zulkifli, M. (2023). Power and language in Indonesian education policy: A CDA approach. *International Journal of Applied Linguistics*, 33(1), 74–91.